

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah serta memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Meski beragam agama, namun Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut data tahun 2010 dari Badan Pusat Statistik (dalam situs www.bps.go.id) 87,18% masyarakat menganut agama Islam, Kristen sebanyak 6,96%, Katolik 2,91%, Hindu 1,69%, Budha 0,72%, Khonghucu 0,05%, dan lainnya 0,13%. Artinya ada sebanyak 87,18% masyarakat muslim yang memiliki potensi untuk dibina baik itu dari segi ilmu pengetahuan umum dan agama, sampai keterampilan dan ekonomi, agar masyarakat muslim Indonesia mampu berdaya dalam segala hal.

Masyarakat harus mampu berdaya, tentu agar mereka dapat menjalani hidup dengan baik dan memiliki masa depan yang cerah. Jika masyarakat sudah berdaya, maka masyarakat dapat dikatakan sudah mandiri. Menurut Sulistiyani (dalam blog Aniamaharani) bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Pengertian pemberdayaan menurut Rappaport dalam Edi Suharto (2005:59) adalah suatu cara di mana rakyat, organisasi, dan komunikasi diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

Menurut Ife dalam Edi Suharto (2005:59), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan yang dimaksud adalah:

- 1) Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- 2) Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- 3) Ide atau gagasan: kemampuan menjangkai, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan social, pendidikan kesehatan.
- 4) Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal, dan kemasyarakatan.
- 5) Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- 6) Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan, dan sosialisasi.

Selanjutnya Suharto (2005:59) menjelaskan pemberdayaan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Untuk memberdayakan masyarakat bisa dilakukan berbagai macam cara, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah melalui pendidikan. Layanan pendidikan di Indonesia menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 13 mengenai Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari tiga jalur pendidikan, yakni jalur formal, jalur nonformal, dan jalur informal.

Coombs (dalam Sudjana, 22-23) membedakan pengertian ketiga jenis pendidikan itu sebagai berikut:

- a. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi

dan yang setaraf dengannya; termasuk ke dalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan professional, yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.

- b. Pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, di luar system persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya.
- c. Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 26 tentang pendidikan nonformal menjelaskan mengenai satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis ta'lim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Majelis ta'lim merupakan satuan dari pendidikan keagamaan Islam yang disamping mengajarkan ilmu agama dan pengamalannya, namun juga pendidikan keagamaan Islam memiliki peran strategis dalam memberdayakan masyarakat sekitar, utamanya adalah pendidikan keagamaan Islam nonformal yang berbentuk diniyah dan pesantren. Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2007 Pasal 21 dikatakan bahwa “majelis ta'lim merupakan salah satu satuan pendidikan diniyah nonformal.”

Fungsi dari majelis ta'lim adalah sebagai tempat belajar-mengajar, lembaga pendidikan dan keterampilan, tempat melakukan kegiatan atau aktivitas, pusat pembinaan dan pengembangan, dan wadah untuk melakukan silaturahmi. Sehingga aktivitas majelis ta'lim tidak terpaku pada kegiatan ta'lim atau ceramah tentang keagamaan saja, namun juga di dalamnya terdapat aktivitas yang bertujuan memberdayakan masyarakat. Majelis ta'lim merupakan lembaga pendidikan Islam yang sangat dekat dengan masyarakat, untuk itulah dikatakan bahwa peran majelis ta'lim sangat strategis dalam memberdayakan masyarakat.

Namun masih banyak ditemukan majelis ta'lim yang terpaku pada kegiatan sebatas transfer ilmu agama islam saja, seperti ta'lim di dalam masjid atau mushala. Padahal jika melihat fungsi dari majelis ta'lim, tentu tidak terbatas pada kegiatan tersebut. Menurut Muhsin MK (2009: 5-7), dikatakan bahwa selain berfungsi sebagai tempat belajar-mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan agama Islam, majelis ta'lim juga berfungsi sebagai pembekalan keterampilan, melatih untuk berorganisasi agar mampu melibatkan diri ke dalam kegiatan kemasyarakatan, sebagai tempat pembinaan dan pengembangan kemampuan serta kualitas sumber daya manusia dalam berbagai bidang seperti, da'wah, politik, dan pendidikan social, dan juga sebagai jaringan komunikasi, silaturahmi, dan jalinan ukhuwwah untuk membangun masyarakat dan tatanan kehidupan yang Islami. Artinya, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui wadah majelis ta'lim ini, adalah selain pesan keagamaan, juga pesan tentang kesehatan, social, kreativitas, dan sebagainya. Tentu saja pelaksanaan majelis ta'lim tidak terbatas pada masjid atau mushala, majelis ta'lim dapat dilakukan di rumah, dan gedung kegiatan (Muhsin MK, 2009: 143).

Keberadaan majelis ta'lim ini dapat diartikan sebagai wadah pendidikan masyarakat yang potensial untuk dikembangkan dan diberdayakan, melihat dari fungsinya yang membekali masyarakat dengan ilmu, iman, dan kreativitas untuk menanamkan hal-hal tersebut ke dalam diri masyarakat, sehingga masyarakat bisa maju dari cara berpikir, dari segi ekonomi, dan lain-lain. Majelis ta'lim jelas keberadaannya ingin memberdayakan masyarakat dari berbagai bidang. Tidak hanya masyarakat perempuan saja yang menjadi sasaran dari majelis ta'lim ini, namun laki-laki pun termasuk ke dalam sasaran majelis ta'lim.

Persepsi pengurus dan masyarakat tentang majelis ta'lim pun kurang tepat jika mengatakan majelis ta'lim hanya untuk kaum ibu yang sudah berkeluarga saja. Karena siapapun boleh dan bisa mengikuti kegiatan majelis ta'lim, tidak dibatasi oleh usia dan gender. Lembaga majelis ta'lim adalah lembaga pendidikan yang

berbasis masyarakat dengan konsep pembelajaran majelis ta'lim yang disebut dengan istilah *learning society*, yaitu konsep yang memberikan keluwesan kepada masyarakat untuk menentukan strategi dan sasaran yang akan dicapai, karena masyarakat itu sendiri memiliki tradisi belajar sendiri yang tidak terbatas pada usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, aspek yang dipelajarinya, dan sebagainya. Sehingga majelis ta'lim yang fleksibel dan terbuka ini harus mampu menjadi salah satu solusi dari permasalahan masyarakat terkait dengan pendidikan formal yang minim diperoleh oleh masyarakat. Tentu saja hal ini bukan berarti menjadikan majelis ta'lim diperuntukkan bagi golongan tertentu.

Majelis ta'lim termasuk salah satu bentuk lembaga dan organisasi da'wah Islam dengan karakter umumnya bercirikan berasas Islam, berkomitmen dalam da'wah dan pembinaan ummat, bersumberkan al-Qur'an dan as-Sunnah, dan tidak berpolitik praktis. Sehingga setiap organisasi pasti ada pengurus yang memiliki fungsi dan tugas yang harus dijalankan, menurut Muhsin MK (2009:23) fungsi dan tugas pangurus majelis ta'lim adalah sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola organisasi sesuai dengan peraturan yang ada seperti menyusun program kerja kegiatan, menyusun gambaran pembagian tugas dan kerja, menangani masalah administrasi dan pengelolaan secretariat, mengatur masalah keuangan dan pertanggungjawabannya, serta membenahi kekurangan dan kelemahan majelis ta'lim yang berjalan selama ini
2. Melaksanakan berbagai kegiatan majelis ta'lim sesuai dengan program yang disusun dan disepakati, membentuk kepanitiaannya, merencanakan masalah keuangan, serta menentukan masalah waktu, tempat, dan acaranya
3. Mengadakan hubungan kerjasama dan komunikasi dengan berbagai kalangan, baik dengan sesama majelis ta'lim, organisasi muslimah lainnya, maupun dengan pemerintah
4. Menyelenggarakan kegiatan musyawarah seperti rapat-rapat pengurus secara rutin, rapat kerja, rapat bersama dengan panitia penyelenggaraan kegiatan, rapat pada akhir periode, dan sebagainya
5. Melaksanakan evaluasi terhadap organisasi, kegiatan, keuangan, dan program yang sudah berjalan, termasuk menyusun laporan kegiatan tahunan dan persiapan untuk pertanggungjawaban di akhir masa jabatan, dan sebagainya.

Berdasarkan dari potensi dan tantangan yang dimiliki oleh majelis ta'lim inilah yang akhirnya mendorong peneliti untuk melakukan kajian mengenai peran pengurus majelis ta'lim.

B. Identifikasi Masalah

Melalui penjelasan di latar belakang masalah, dapat diperoleh identifikasi berbagai permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Fungsi majelis ta'lim sering difokuskan hanya kepada kajian keislamaan saja dengan bentuk ta'lim atau tabligh akbar, sedangkan fungsi majelis ta'lim yang lainnya seperti tempat pembinaan dan pengembangan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, wadah berkegiatan dan berkeaktivitas serta untuk memperoleh ketrampilan sebagai bekal bagi masyarakat, menjadi terabaikan. Peran majelis ta'lim khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat masih kurang terasa oleh masyarakat sekitar.
2. Peran pengurus majelis ta'lim yang kurang massif dalam merumuskan kegiatan bagi jama'ahnya dan lebih senang menjalani kegiatan yang sudah ada tanpa adanya penambahan atau perubahan kegiatan yang didasari pada kebutuhan masyarakat sehingga terkesan tidak kreatif serta cenderung pasif mengajak masyarakat untuk ikut kegiatan majelis ta'lim.
3. Persepsi masyarakat dan pengurus majelis ta'lim tentang gender dan kelompok jama'ah majelis ta'lim yang hanya terbatas pada ibu-ibu, padahal pembinaan dan segala bentuk kegiatan yang berada di majelis ta'lim tidak hanya untuk ibu-ibu saja, namun bapak-bapak, anak-anak, dan kaum remaja pun perlu memperolehnya. Juga mengenai peran dari majelis ta'lim.
4. Program-program majelis ta'lim yang baru terfokus pada ta'lim-ta'lim penyampaian ilmu keagamaan saja, sedangkan program majelis ta'lim tentu tidak hanya sekedar ta'lim agama Islam namun sangat banyak dan menyeluruh, seperti kegiatan social majelis ta'lim yang meliputi santunan

kepada anak yatim, orang-orang miskin dan para manula, kerja bakti, memberikan layanan masyarakat, membangun wirausaha atau lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja.

5. Dalam menjalankan kegiatan majelis ta'lim, sejauh mana melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat, melihat sasaran dari majelis ta'lim yang meliputi seluruh lapisan masyarakat, tentu perlu melibatkan banyak pihak untuk menjadikan majelis ta'lim produktif sesuai dengan fungsi majelis ta'lim itu sendiri.
6. Bila ingin mengetahui keberadaan suatu majelis ta'lim itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar atau majelis ta'lim tersebut sudah melaksanakan perannya dengan ideal, maka tentu dapat diketahui dengan jumlah partisipasi serta respon dari masyarakat terhadap setiap kegiatan atau program majelis ta'lim.

Fungsi majelis ta'lim sebagai tempat belajar-mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan agama Islam, majelis ta'lim juga berfungsi sebagai pembekalan keterampilan, melatih untuk berorganisasi agar mampu melibatkan diri ke dalam kegiatan kemasyarakatan, sebagai tempat pembinaan dan pengembangan kemampuan serta kualitas sumber daya manusia dalam berbagai bidang seperti, da'wah, politik, dan pendidikan social, dan juga sebagai jaringan komunikasi, silaturahmi, dan jalinan ukhuwwah untuk membangun masyarakat dan tatanan kehidupan yang Islami. Dari pemaparan fungsi majelis ta'lim tersebut, maka sudah pasti majelis ta'lim merencanakan berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan dengan fungsi majelis ta'lim, lalu bagaimanakah dampak atau pengaruh dari kegiatan yang diselenggarakan oleh majelis ta'lim tersebut bagi masyarakat.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut, maka perlu adanya pembatasan masalah, yakni penelitian ini dilakukan di Majelis Ta'lim Jami'atul Khoir yang bertempat di Desa Parakanjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, serta penulis membatasi subjek penelitiannya hanya pada lingkup masyarakat yang terdaftar data dirinya di Majelis Ta'lim Jami'atul Khoir sehingga masyarakat ini disebut sebagai jama'ah Majelis ta'lim Jami'atul Khoir.

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, terbentuklah rumusan masalah penelitian yaitu, "Bagaimanakah peran pengurus Majelis Ta'lim Jami'atul Khoir terhadap pemberdayaan jama'ahnya"

Melalui rumusan masalah penelitian, maka berikut ini adalah poin-poin pembatasan masalah dalam penelitian ini:

1. Program-program apa sajakah yang sudah dilaksanakan oleh pengurus majelis ta'lim?
2. Bagaimanakah keberdayaan yang dicapai jama'ah majelis ta'lim melalui program dari majelis ta'lim?
3. Bagaimanakah partisipasi jama'ah majelis ta'lim dalam mendukung setiap program majelis ta'lim?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban terhadap rumusan masalah yaitu, untuk mengetahui peran pengurus majelis ta'lim terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Parakanjaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan dari hasil survey hal-hal berikut ini:

1. Untuk mengetahui program-program apa saja yang sudah direncanakan oleh pengurus majelis ta'lim dalam memberdayakan masyarakat.

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk keberdayaan yang dicapai masyarakat melalui program dari majelis ta'lim.
3. Untuk mengetahui jenis partisipasi masyarakat dalam mendukung setiap program majelis ta'lim.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah untuk meningkatkan peran majelis ta'lim terhadap pemberdayaan masyarakat.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi keilmuan pendidikan keagamaan Islam nonformal.
2. Manfaat praktis
 - a. Untuk Kementerian Agama Republik Indonesia dan pengelola majelis ta'lim, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan penambah wawasan mengenai kondisi ril majelis ta'lim.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan tentang variasi kegiatan ataupun pengembangan kegiatan yang dapat dilakukan majelis ta'lim dalam pemberdayaan masyarakat.
 - d. Untuk pengurus majelis ta'lim diharapkan dari penelitian ini kedepannya dapat membantu pengurus dalam merumuskan kegiatan majelis ta'lim dengan mengsinkronkan antara kegiatan dengan peran dan fungsi majelis ta'lim yang sesungguhnya.
 - e. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang peran majelis ta'lim dalam pemberdayaan masyarakat.

F. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi berisi rincian urutan penulisan. Berikut ini adalah rincian urutan penulisan skripsi:

- Bab I: Pendahuluan.

Terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, struktur organisasi skripsi.

- Bab II: Kajian Pustaka

Kajian pustaka berfungsi sebagai landasan teoritik dalam menyusun pertanyaan penelitian. Kajian pustaka berisi konsep dan teori yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

- Bab III: Metode Penelitian

Menjabarkan secara rinci mengenai lokasi dan sampel penelitian, metode penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

- Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdiri dari dua hal utama, yakni: pemaparan analisis data dan pembahasan data.

- Bab V: Kesimpulan dan Saran

Menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Kesimpulan berupa uraian padat berisi jawaban dari rumusan masalah. Setelah membuat kesimpulan, dilanjutkan dengan memberikan saran kepada para pengguna hasil penelitian ini juga untuk peneliti lain yang akan mengadakan penelitian seperti ini.